



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Desember 2024

Halaman: 2

Kepesertaan JKN di Kota Yogyakarta 99,57 Persen

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan BPJS Kesehatan mengenai penerapan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Universal di Kota Yogyakarta di Balai Kota, Senin (16/12). Kegiatan ini untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta, M Idar Aries Munandar menyampaikan, Pemkot Yogyakarta telah berhasil meraih UHC Awards tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK pada 18 Agustus 2024 di Jakarta. Dengan capaian tersebut merupakan bukti komitmen Pemkot Yogyakarta

untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk.

Saat ini, lanjutnya, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) di wilayah Kota Yogyakarta sebesar 413.237 peserta dari total penduduk 415.021 jiwa atau 99,57 persen. Selain itu, pada jumlah kepesertaan tersebut keaktifan peserta mencapai 89,84 persen atau 372.874 jiwa. Khusus untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) Bukan Pekerja (BP) Pemda yang dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta adalah sebanyak 77.482 jiwa atau 18,6 persen dari total penduduk. Sehingga, biaya pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta ber NIK Kota Yogyakarta sebanyak 923.385 kasus dengan total biaya Rp 727.877.889.712 hingga 31 Desember 2023.

"Dengan capaian ini, harapan-



Penandatanganan Nota Kesepakatan UHC diikuti perwakilan Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Yogyakarta.

nya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akses pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta yang mudah cepat dan setara. Di mana saat ini NIK menjadi identitas resmi peserta JKN yang bisa digunakan untuk

mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap layanan JKN semakin mudah diakses," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengungkapkan, Pemerintah

Kota Yogyakarta berhasil meraih tingkat utama dalam pencapaian UHC. Hal ini menandakan keberhasilan dan komitmen yang tinggi dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya.

Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot Yogyakarta telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 2.800 per peserta untuk tahun 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program kesehatan, termasuk Program Bantuan Iuran (PBI) dan berbagai kegiatan lainnya yang didukung oleh APBD dan APBN. "Dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa pembiayaan kesehatan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta," ungkapnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005